

## Penguatan Perpustakaan Untuk Pembangunan: Sebuah Konsep Transformasi Berbasis Inklusi Sosial

Wahyu Deni Prasetyo, Dian Utami  
Perpustakaan Nasional RI

[\\*wahyudeniprasetyo@gmail.com](mailto:*wahyudeniprasetyo@gmail.com)

Disubmit: 19 Juni 2019 | Direview: 17 Juli 2020 | Revisi: 1 September 2020

### ABSTRACT

Goals of national development as the purpose of the “Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945” are building a smart nation’s life and advancing public welfare. Library has a strategic role in national development by become a place who can used by people without limitation of social group. This concept is called library service based on social inclusion. In this article, the author tries to find definition of library service based on social inclusion and describe what changes are needed.

**Keywords :** Library, Social Inclusion, National Development

### ABSTRAK

Arah tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana diamanahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk membangun kehidupan bangsa yang cerdas dan memajukan kesejahteraan umum. Perpustakaan memiliki peran strategis dalam pembangunan dengan menjadi wahana belajar masyarakat yang pemanfaatan jasa layanannya bisa dinikmati oleh seluruh lapisan sosial masyarakat tanpa terkecuali. Konsep layanan seperti ini dinamakan dengan layanan berbasis inklusi sosial. Dalam artikel ini, penulis mencoba mencari definisi inklusi sosial di perpustakaan dan pembenahan yang diperlukan oleh perpustakaan untuk mentransformasikan layanannya menjadi berbasis inklusi sosial.

**Kata kunci :** Perpustakaan, Inklusi Sosial, Pembangunan Nasional

### PENDAHULUAN

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45), bapak pendiri bangsa merumuskan pemikiran yang visioner dalam membangun bangsa Indonesia. Program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah bermuara pada dua tujuan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Dalam usaha untuk menjalankan amanah konstitusi tersebut, pemerintah melakukan sebuah strategi kebudayaan yaitu melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan dan literasi dalam usaha membangun Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai penggerak utama pembangunan.

Perpustakaan bisa menjadi strategi kebudayaan dalam pembangunan dengan membangun SDM agar lebih kompetitif dalam menghadapi tantangan pembangunan. Dalam konteks pembangunan, perpustakaan dihadapkan pada sebuah konsep layanan jasa informasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan diharapkan masyarakat pengguna jasa perpustakaan mendapatkan input informasi yang menambah kompetensi dan berifat stimulan untuk menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan. Untuk itulah diperkenalkan sebuah konsep tentang inklusi sosial di perpustakaan dan diharapkan seluruh perpustakaan mulai berbenah dengan menerapkan layanan berbasis inklusi sosial.

Wijayanti (2019) mengartikan inklusi sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka dengan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latarbelakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya, dan lainnya. Untuk bisa mendefinisikan inklusi sosial tidak bisa lepas dari term eksklusif sosial karena dua term tersebut merupakan *counterpart* antara satu dengan yang lainnya. Rawal (2008) dengan mengutip P. Francis mendefinisikan eksklusif sosial sebagai suatu konsep yang mencoba membatasi

akses sebagian kelompok sosial atau pengucilan dengan perampiasan hak dalam bersosial. Fourie (2007) mengatakan bahwa :

*“Social inclusion refers to all efforts and policies to promote equality of opportunity to*



*people from all circumstances and from all socially excluded categories.”*

Dengan definisi tersebut maka inklusi sosial merujuk pada suatu proses yang memungkinkan individu atau kelompok tertentu memiliki hak akses dalam kehidupan sosial. Maka Definisi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah terbukanya akses layanan perpustakaan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan informasi mereka. Layanan perpustakaan bisa dinikmati oleh semua golongan sosial. Layanan perpustakaan bisa diarahkan kepada layanan informasi-informasi yang bersifat inspiratif dan stimulan dalam membangun semangat masyarakat untuk menjalankan ekonomi kreatif.

Indonesia sudah memiliki payung hukum yang secara eksplisit menyebutkan layanan perpustakaan seluruh kalangan masyarakat tanpa ada pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan pada pasal 5 ayat 1, 2, dan 3 yaitu :

- (1) Masyarakat memiliki hak yang sama untuk :
  - a. Memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
  - b. Mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
  - c. Mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan ;
  - d. Berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan;
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/ atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Dalam kaitannya dengan pembangunan Alhumami (2018) mendefinisikan transformasi berbasis inklusi sosial yaitu sebuah transformasi layanan perpustakaan dengan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. Perpustakaan bukanlah sekedar tempat penyimpanan buku, namun keberadaannya sebagai wahana pembelajaran bersama untuk pengembangan potensi masyarakat. Informasi-informasi yang tersedia di perpustakaan adalah informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengembangkan potensi masyarakat. Selain menyediakan informasi, Transformasi perpustakaan sebagai wahana yang memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan dan keterampilan sehingga peran perpustakaan sebagai advokat informasi.

Artikel ini bertujuan merumuskan penguatan-penguatan yang diperlukan perpustakaan untuk mencapai sebuah konsep perpustakaan yang mentransformasikan layanannya berbasis inklusi sosial.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode kualitatif dengan deskriptif analisis yang memiliki pengertian sebagai suatu metode penulisan dimana penulis mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, aktifitas, laporan pelaksanaan program dan kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Pengambilan data didasarkan atas literatur yang ada. Poin penting dari penulisan makalah ini adalah dilakukannya sintesa dan menarik kesimpulan yang tersaji pada bagian akhir tulisan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Layanan Berbasis Inklusi Sosial**

Untuk bisa menjawab tantangan pembangunan, maka transformasi layanan berbasis inklusi sosial menjadi suatu yang mutlak untuk dilakukan perpustakaan. Jasa layanan perpustakaan harus bisa dinikmati oleh semua lapisan sosial masyarakat. Pemerintah Indonesia sendiri sudah memberikan payung hukum yang menjamin hak akses terhadap informasi yang ada di perpustakaan kepada seluruh masyarakat Indonesia memperoleh layanan perpustakaan baik itu di daerah terpencil, terisolasi, terbelakang hingga masyarakat yang memiliki disabilitas.

Konsep layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial sejalan dengan apa yang diungkapkan dalam IFLA *Multicultural Library Manifesto* (2008) menyebutkan bahwa perpustakaan dalam

perannya dalam menghadapi masyarakat global, jasa layanan perpustakaan harus bisa melayani seluruh anggota kelompok masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Sebuah konsep layanan jasa perpustakaan untuk semua tanpa adanya diskriminasi terhadap kelompok sosial tertentu. Sipila (2015) mengatakan bahwasanya akses terhadap informasi merupakan hal yang penting untuk pertumbuhan ekonomi, kebudayaan, pengembangan sosial masyarakat di berbagai negara. Informasi dibutuhkan oleh semua masyarakat di berbagai kalangan, dan perpustakaan memegang peran sentral sebagai penghubung informasi dengan masyarakat. Perpustakaan berperan sebagai advokat informasi dan bahkan menjadi wahana pembelajaran semua kalangan. Perpustakaan menjadi ruang yang terbuka untuk seluruh lapisan sosial masyarakat untuk mengembangkan potensi diri. Konsep layanan perpustakaan yang dianut adalah inklusi, bukan eksklusif. Konsep ini sudah diterapkan oleh beberapa negara di benua Asia, Finlandia, hingga ke Tanzania.



Gambar 1. Pelatihan ICT di Perpustakaan di Tanzania

<http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2015/mar/02.pdf>

Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial bisa dalam perspektif pembangunan nasional bisa dimaknai sebagai strategi kebudayaan untuk mewujudkan *literate society* melalui gerakan kolektif yang bersifat masal, meluas, dan berskala nasional. *Literacy* dan *literate society* merupakan puncak pencapaian dari suatu proses panjang pendidikan baik itu pendidikan formal maupun non formal yang ditempuh oleh masyarakat.

Perpustakaan memainkan peran sebagai lembaga yang menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk bisa memainkan peran tersebut maka harus ada penguatan terhadap lembaga perpustakaan. Penguatan perpustakaan memiliki dampak yang besar terhadap penguatan sosial masyarakat dengan membentuk suatu masyarakat yang literat. Disini jelas bahwasanya penguatan lembaga perpustakaan memiliki imbas pada penguatan sosial masyarakat.

Presiden IFLA 2013 – 2015, Sinikka Sipila dalam sebuah tulisan berjudul *Strong Libraries, Strong Societies* mengungkapkan bahwa :

*“If we wish to secure as many working places in libraries as possible, in spite of the economic downturn and difficulties in national and local budgets, then it is crucial to clearly communicate the importance of qualified staff to good library and information services and in that way to the concept of strong libraries. Libraries can legitimately request sustainable funding for the key services that they provide to the community. Not just for the provision of improved physical infrastructure and collections, but also the availability of library education to train more professional staff.”*

### **Pengembangan Pustakawan**

Staf Perpustakaan atau pustakawan berperan sebagai sosok sentral dalam penguatan perpustakaan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi langkah awal transformasi perpustakaan. Staf Perpustakaan atau Pustakawan memegang peran penting untuk melakukan penguatan perpustakaan untuk penguatan sosial masyarakat dan menjadi faktor penting selain pembenahan infrastruktur dan koleksi bahan pustaka. Untuk memperkuat peran perpustakaan, pustakawan dituntut untuk menunjukkan dedikasi terhadap kemajuan lembaga perpustakaan, mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi komunikasi informasi, komitmen dan antusias untuk

melayani masyarakat, dan mampu untuk bekerjasama sekaligus antusias dalam mengerjakan permasalahan dalam tim.

Menurut Wijayanti (2019), strategi pengembangan diri pustakawan meliputi hal-hal berikut:

1. Studi banding/ Benchmark
2. Studi Lanjut
3. Membaca literatur di jurnal ilmiah
4. Mengikuti perkembangan teknologi di bidang perpustakaan
5. Bekerjasama dengan profesional dalam disiplin ilmu lain
6. Membangun kemitraan dengan pelanggan agar memahami kebutuhan informasi mereka dengan lebih baik dan mampu membantu sesuai kebutuhan.

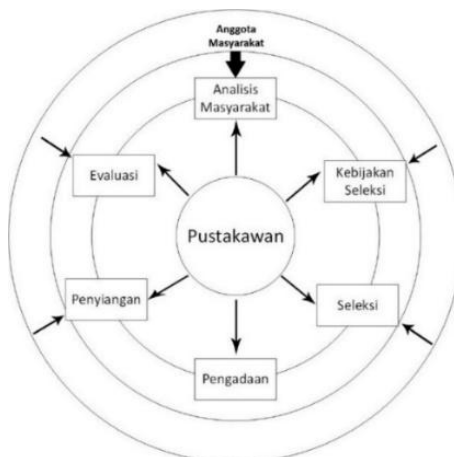
Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten diperlukan untuk membangun layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Diperlukan penyusunan program pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan untuk peningkatan SDM. Pustakawan sebagai Sumber Daya Manusia utama penggerak perpustakaan perlu membuka diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Selain mengikuti pelatihan yang diadakan oleh lembaga diklat, pustakawan juga bisa belajar secara mandiri dalam rangka peningkatan SDM. Pustakawan harus bisa memahami informasi apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat pemustaka dan menyajikan informasi dalam bentuk yang bisa menarik minat untuk membaca dengan kemas ulang informasi. Pustakawan dituntut untuk menghasilkan manfaat yang bisa dirasakan betul oleh masyarakat pengguna jasa perpustakaan. Pustakawan wajib mengaktualisasikan diri untuk dapat membuktikan bahwa mereka bisa memberikan nilai tambah. Oleh karena itu pustakawan harus tanggap terhadap perubahan dan tuntutan zaman dan mampu menemukan peluang untuk perbaikan dalam layanan, sikap, dan perilaku untuk mendapatkan dukungan dari jajaran top manajemen.

Penguatan di bidang infrastruktur juga diperlukan oleh perpustakaan untuk menjadikan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran yang interaktif bagi masyarakat pengguna perpustakaan. Sejalan dengan konsep layanan berbasis inklusi sosial, maka pembangunan infrastruktur perpustakaan juga diarahkan mengikuti tren perpustakaan menjadi ruang yang terbuka bagi semua kalangan untuk berkumpul, berekspresi dan mengembangkan kompetensi diri. Perpustakaan bukanlah lagi sebuah bangunan yang penuh rak buku dan ruang baca, infrastruktur perpustakaan baik itu eksterior dan interiornya didesain semenarik mungkin agar pemustaka dapat merasakan kenyamanan ketika berkunjung ke perpustakaan. Menurut Priyanto (2015) paradigma lama tersebut harus sudah bergeser dengan menjadi tempat aktivitas pembelajaran yang inovatif dan berwawasan teknologi dengan membangun ruang-ruang untuk karya-karya kolaborasi. Pembangunan infrastruktur perpustakaan diarahkan dengan menyediakan ruang-ruang pembelajaran (*learning spaces*) dan ruang untuk berekspresi (*makerspace*).

### **Pengembangan Koleksi**

Dengan melakukan transformasi layanan berbasis inklusi sosial, perpustakaan menjadi rujukan informasi semua golongan sosial masyarakat. Untuk bisa memainkan peran tersebut, maka perpustakaan harus bisa mengembangkan koleksi bahan pustaka secara tepat sasaran. Proses pengembangan bahan pustaka haruslah menggunakan sebuah metode yang terencana, sistematis, dan terarah. Pengembangan koleksi bahan pustaka merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh perpustakaan guna membangun koleksi yang bisa memenuhi kebutuhan informasi pemustakanya. ALA *Glosary of Library and Information Science* yang dikutip oleh Yulia (2011) mendefinisikan pengembangan koleksi bahan pustaka sebagai suatu proses besar dalam menjaga kualitas informasi yang ada di perpustakaan yang di dalamnya mencakup kebijakan seleksi, penilaian terhadap kebutuhan pengguna dan pengguna potensial, kajian penggunaan koleksi, evaluasi koleksi, identifikasi kebutuhan koleksi, seleksi bahan pustaka, perencanaan untuk bekerja sama antar perpustakaan, pemeliharaan koleksi dari kerusakan hingga kegiatan penyiangan.

Evans (2000) menggambarkan proses pengembangan koleksi bahan pustaka ke dalam 6 komponen kegiatan sebagaimana berikut :



Gambar 2. Proses Pengembangan Koleksi

Perpustakaan yang mentransformasikan layanannya berbasis inklusi sosial, haruslah bisa memahami kebutuhan informasi dari masyarakat penggunanya. Dengan memahami kebutuhan informasi tersebut, maka diharapkan perpustakaan bisa melakukan pelayanan prima dengan menyediakan informasi tersebut di perpustakaan. Masyarakat pengguna jasa layanan perpustakaan terdiri dari berbagai macam golongan sosial masyarakat dengan tingkat pendidikan yang beragam. Keragaman ini tentu saja berkorelasi pada kebutuhan informasi yang bervariasi. Layanan perpustakaan berbasis inklusi haruslah bisa mengakomodir kebutuhan informasi yang bervariasi tersebut. Dalam kaitannya dengan pembangunan, koleksi bahan pustaka yang menjadi prioritas dalam pengembangan koleksi bahan pustaka diarahkan pada subjek ilmu terapan yang bisa menambah pengetahuan dan bersifat stimulan untuk mendorong Bergeraknya ekonomi kreatif dalam masyarakat.

Pengembangan koleksi bahan pustaka dalam pelaksanaannya, sering terkendala oleh beberapa permasalahan. Permasalahan yang sering timbul adalah terbatasnya anggaran pengembangan bahan pustaka dihadapkan pada kebutuhan informasi yang beragam dari masyarakat pengguna perpustakaan. Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan perencanaan yang matang dan sebuah metode khusus untuk perpustakaan dalam mengembangkan koleksi bahan pustakanya. Diperlukan analisis kebutuhan informasi masyarakat dengan melakukan kajian pengguna agar terpetakan kebutuhan informasi di masyarakat. Dengan melakukan kajian pengguna, anggaran yang disediakan untuk kegiatan pengembangan koleksi bahan pustaka bisa digunakan secara efektif tanpa mengurangi mutu jasa layanan informasinya.

Kajian-kajian terhadap pengguna dan komunitas yang dilayaninya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan pengadaan bahan pustaka yang efektif, seperti yang ditunjukkan oleh TD. Wilson dalam Evans (2000). Pentingnya kajian pengguna karena hal-hal berikut :

1. Perhatian utama adalah penemuan fakta-fakta kehidupan sehari-hari dari populasi yang dilayani.
2. Dengan kajian pengguna bisa dimengerti kebutuhan-kebutuhan yang mendorong individu kedalam perilaku pencarian informasi.
3. Dengan kajian pengguna bisa dipahami lebih baik akan pentingnya informasi bagi masyarakat pengguna perpustakaan dalam kehidupan sehari-hari.
4. Dengan semua itu, perpustakaan seharusnya memperoleh pengertian yang lebih baik terhadap pelanggan dan dapat merancang pengadaan

Sering kali pustakawan menginginkan adanya pembaharuan pada komposisi subjek yang akan diadakan pada proses pengembangan koleksi bahan pustaka. Tanpa menggunakan data yang diperoleh dengan mengadakan survei dan kajian pengguna, rekomendasi pembaharuan subjek yang akan diadakan maka pengambil kebijakan akan sulit untuk mengambil keputusan tersebut karena kurang memiliki dasar ilmiah. Hasil dari kajian pustakawan diharapkan bisa menjadi salah satu dasar pimpinan manajemen perpustakaan untuk merumuskan kebijakan pengembangan koleksi bahan pustaka secara tertulis. Kebijakan pengembangan koleksi yang tertulis nantinya akan dijadikan pegangan pustakawan di bagian pengembangan koleksi untuk melakukan seleksi bahan pustaka. Setelah seleksi bahan pustaka dilakukan maka kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah pengadaan.

Pengadaan bahan pustaka bisa dilakukan dengan pembelian langsung atau menghubungi penerbit untuk menyediakan koleksi dari katalog penerbit yang sudah di seleksi pustakawan. Perlu diperhatikan juga jenis koleksi bahan pustaka yang akan dikembangkan apakah hanya koleksi berbentuk monograf ataukah dikembangkan juga koleksi digital. Koleksi digital bisa dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan perpustakaan karena dengan koleksi digital, perpustakaan bisa melayani secara online bahan pustaka tanpa adanya batasan waktu dan tempat. Perpustakaan yang melayani koleksi monograf dan koleksi digital dalam bentuk perpustakaan digital, disebut dengan perpustakaan hibrida (*hybrid library*). Istilah perpustakaan hibrida pertama kali dikemukakan oleh Chris Rusbridge dalam artikel yang dimuat di *D-Lib Magazine* pada tahun 1998. Dengan koleksi digital, peluang perpustakaan untuk memperluas jangkauan layanan hingga ke daerah terpencil menjadi semakin besar dengan media internet sebagai penghubung antara perpustakaan dengan masyarakat pengguna. Koleksi digital memungkinkan juga untuk perpustakaan memberikan layanan 24 jam dalam seharinya. Kedatangan era informasi digital memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan sosial masyarakat. Perpustakaan harus bisa beradaptasi dengan perubahan ini dan memanfaatkan kemajuan teknologi di era digital untuk memperluas jangkauan layanan perpustakaannya.

Proses pengembangan bahan pustaka tidak berhenti sampai pada kegiatan pengadaan, diperlukan kegiatan penyiangan untuk menyisihkan koleksi bahan pustaka yang kurang dalam pemanfaatannya dari rak agar koleksi bahan pustaka yang dilayankan adalah koleksi unggulan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna perpustakaan. Komponen kegiatan yang terakhir adalah evaluasi pengadaan untuk mencari kekurangan dan menjadi masukan dalam pengembangan koleksi bahan pustaka kedepannya.

Proses pengembangan koleksi bahan pustaka bukan hanya berkuat pada pengadaan koleksi bahan pustaka saja, namun sejatinya adalah sebuah ekosistem yang terdiri dari komponen-komponen yang memiliki keterkaitan diantara komponen-komponen tersebut.

Penguatan lembaga perpustakaan diharapkan menghasilkan penguatan kondisi sosial masyarakat. Penguatan perpustakaan tercermin dari visi dan misi perpustakaan. Lankes dalam Sipila (2015) menyatakan bahwa tanggung jawab perpustakaan adalah memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh anggota komunitas masyarakat perpustakaan. Untuk melakukan penguatan lembaga perpustakaan haruslah dimulai dengan menguatkan visi dan misinya terlebih dahulu. Misi dari perpustakaan adalah meningkatkan sosial masyarakat dengan memfasilitasi kebutuhan informasi yang bisa menunjang hal tersebut. Visi dan misi perpustakaan harus diarahkan pada pembangunan masyarakat yang *well informed* dan yang aktif terhadap informasi.

Dengan masyarakat yang aktif teradap informasi maka akan bermuara pada peningkatan kompetensi SDM dan SDM yang kompeten adalah modal awal dalam pembangunan. Dengan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial juga diharapkan akan menggerakkan ekonomi kreatif dalam masyarakat karena informasi-informasi yang disajikan oleh perpustakaan bersifat stimulan dan meningkatkan kompetensi masyarakat untuk mengembangkan ekonomi kreatifnya.

## KESIMPULAN

Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah jawaban dari tantangan pembangunan. Dengan mentransformasikan layanan perpustakaan menjadi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial maka perpustakaan memiliki peran sebagai lembaga penyedia informasi yang keberadaanya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai wahana pembelajaran tanpa adanya batasan usia, gender, hingga golongan sosial masyarakat. Dari perspektif inilah Konsep layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial juga diharapkan bisa melayani masyarakat dengan memberikan informasi-informasi yang bersifat stimulan mendorong ekonomi kreatif hingga meningkatkan kompetensi para pelaku usaha ekonomi kreatif untuk lebih mengembangkan usaha mereka.

Untuk bisa mentransformasikan layanannya berbasis inklusi sosial, maka perpustakaan harus melakukan pembenahan-pembenahan, yaitu mengubah arah pengembangan infrastruktur perpustakaan menjadi ruang terbuka yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kompetensinya dan berekspresi; peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di lembaga perpustakaan, yang dalam hal ini adalah staf dan pustakawan; dan penyediaan koleksi bahan pustaka yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan informasi masyarakat pengguna perpustakaan dengan



menggunakan sebuah metode pengembangan koleksi bahan pustaka yang terencana, sistematis, dan terarah.

Diharapkan dengan penguatan lembaga perpustakaan dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial berdampak pada penguatan sosial masyarakat dan turut serta membangun bangsa dengan membangun Sumber Daya Manusia sebagai motor pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- American Library Association (1983). *The ALA glossary of library and information science*. Chicago: American Library Association Publisher
- Alhumami, A. (2018). *Kebijakan Pembangunan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dalam Mendukung Pencapaian SDGs*. Disampaikan pada Kongres IPI XIV, Tanggal 10 Oktober 2018: Surabaya.
- Evans, G.E. and Margaret R. Zarnosky. (2000). *Developing Library and Information Center Collections*. Englewood, Colorado : Libraries Unlimited.
- Fourie, I. (2007). *Public Libraries Addressing Social Inclusion : How we may think ....* . Disampaikan pada world library and information congress : 73 RD IFLA General Conference and Council. Tersedia di : <http://e-resources.perpusnas.go.id:2308/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=57e32ff9-9f0a-4a44-ba3f-7edd0a75d62b%40sessionmgr4008> dan <https://archive.ifla.org/IV/ifla73/papers/128-Fourie-en.pdf> diakses pada tanggal 5 Mei 2019 pada pukul 20.28 WIB
- IFLA. (2008). *Multicultural library manifesto*. IFLA Section on Library Services to Multicultural Populations. Tersedia di : <http://archive.ifla.org/VII/s32/pub/MulticulturalLibraryManifesto.pdf> Diakses pada tanggal 8 Mei 2019 pada pukul 20.30 WIB
- Indonesia. (1945) *Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945*. Tersedia di : <http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf> diakses pada tanggal 4 mei 2019 pada pukul 11.00 WIB.
- Priyanto, I.F. (2015). "Librarians, Space, and the Atmosphere". Disampaikan pada Seminar, Lokakarya, dan Workshop Kepustakawanan Nasional Munas ISIPII dan Rakernas FPPTI, Tanggal 19 – 21 Agustus 2015 : Bandung. Tersedia di: <http://pspi.upi.edu/wp-content/uploads/03-Ida-Fajar-Priyanto-Lingkungan-Pembelajaran-Berbasis-Pengetahuan.pdf> diakses pada tanggal 6 Mei 2019 pada pukul 16.10 WIB.
- Rawal, N. (2008). "Social Inclusion and Exclusion: A Review", dalam *Dhaulagiri Journal of Sociology and Anthropology*, Volume 2, hal. 161-180. Tersedia di: [https://www.academia.edu/7838559/Social\\_Inclusion\\_and\\_Exclusion\\_A\\_Review\\_1](https://www.academia.edu/7838559/Social_Inclusion_and_Exclusion_A_Review_1) Diakses pada tanggal 2 Mei 2019 pada pukul 20.00 WIB
- Rusbribde, Chris (1998). *Towards the Hybrid Library*. *D-Lib Magazine* July/ August.
- Sardjoko, Subandi (2018). *Kebijakan Pembangunan Perpustakaan Untuk Peningkatan Kesejahteraan dalam RKP 2019*. Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Perpustakaan 2018, Tanggal 27 Maret 2018 : Jakarta.
- Sipila, Sinikka (2015). "Strong Libraries Strong Societies". *El Profesional de la informacion*, v.24, n.2, pp 95 – 101 . Tersedia di : <http://e-resources.perpusnas.go.id:2308/eds/detail/detail?vid=0&sid=bc10229f-e2e1-46ba-a8fb-a55e816fe3f2%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=101662216&db=lih> dan <http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2015/mar/02.pdf> Diakses pada tanggal 4 Mei 2019 pada pukul 01.18 WIB
- Indonesia. (2007). *Undang-undang Nomor 47 tahun 2007 tentang perpustakaan*. Tersedia di : [http://ppid.perpusnas.go.id/upload/regulasi/094607-UU\\_No\\_43\\_tahun\\_2007\\_tentang\\_Perpustakaan.pdf](http://ppid.perpusnas.go.id/upload/regulasi/094607-UU_No_43_tahun_2007_tentang_Perpustakaan.pdf) diakses pada tanggal 4 Mei 2019 pada pukul 12.02 WIB
- Yulia, yuyu, dkk (2011). *Materi Pokok Pengembangan Koleksi*. Jakarta : Penerbit Universitas Terbuka
- Wijayanti, L. (2019). *Peningkatan Kompetensi SDM Perpustakaan Khusus Dalam Mewujudkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial*. Disampaikan pada diskusi panel perpustakaan khusus, Rapat Koordinasi Nasional Perpustakaan Tahun 2019, Tanggal 15 Maret 2019 : Jakarta.